



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI V DPR RI  
DENGAN  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI RI**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke-	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 13 Maret 2024
Waktu	:	Pukul 10.10--11.35 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
Acara	:	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023; 2. Membahas Program Kerja Tahun 2024; 3. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023; dan 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat	:	Nunik Prihatin Budiastuti, S.H. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
Hadir	:	PIMPINAN 1. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG))

**ANGGOTA**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

2. Mochamad Herviano
3. Sri Rahayu
4. Harvey B. Malaihollo

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

5. Drs. Hamka B Kady, M.S.
6. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
7. Muhammad Fauzi, S.E.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

8. Sudewo, S.T., M.T.

9. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

10. Drs. H. Tamanuri, M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

11. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.

12. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

13. Drs. Anwar Hafid, M.Si.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

-

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(F-PPP)

14. Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M.

Izin

- :
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)
  2. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
  3. Ir. Sudjadi (F-PDI Perjuangan)
  4. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
  5. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H. (F-PDI Perjuangan)
  6. Cen Sui Lan (F-PG)
  7. Ilham Pangestu (F-PG)
  8. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F-PD)
  9. Drs. Fadoli, M. Ikom. (F-PD)
  10. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)
  11. Ir. H. Sigit Sosiantomo (F-PKS)
  12. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. (F-PKS)
  13. H. Boyman Harun, S.H. (F-PAN)
  14. Hj. Hanna Gayatri, S.H. (F-PAN)

Undangan

- :
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.); dan
  2. Jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, beserta  
Seluruh jajarannya, dan  
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sebelum dilanjutkan, perkenankan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriyah bagi Saudara-Saudara yang menjalankannya.

Berdasarkan informasi dari sekretariat, daftar hadir Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 18 orang dari 5 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat kerja hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, program kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2024, serta hasil pemeriksaan BPK RI semester I 2023, dan lain-lain.

Pimpinan,  
Anggota Komisi V DPR RI, dan  
Menteri, serta  
Hadirin yang kami hormati,

Untuk agenda pertama, terkait evaluasi APBN tahun anggaran 2023, Komisi V DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran sesuai saran dan masukan yang telah diberikan Komisi V DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya.

Adapun terkait dengan agenda kedua, yaitu membahas program kerja tahun Anggaran 2024.

Perlu kami sampaikan bahwa, pagu anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dalam tahun anggaran 2024 adalah sebesar 2,765 triliun. Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana pagu anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu.

Selanjutnya, kami ingin pula mendapatkan penjelasan tentang *automatic adjustment* di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Kemudian terkait agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Namun demikian, masih terdapat 17 temuan terkait belanja barang atau jasa dan temuan atas aset yang diindikasikan kerugian negara sebesar 4,1 miliar. Temuan tersebut umumnya terkait kelebihan pembayaran belanja pegawai, kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan serta pengelolaan aset yang belum tertib.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif sampai sejauhmana temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023 tersebut sudah ditindaklanjuti, serta langkah-langkah preventif yang, yang ditempuh agar temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.

Pimpinan,  
Anggota Komisi V DPR RI, dan  
Menteri Desa, PDT, serta  
Hadirin yang berbahagia,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kami mempersilakan kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan dan pemaparannya.

Kami persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DR. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Yang kita hormati para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,

Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaporkan 3 hal yang sudah diagendakan dan tentu nanti diharapkan ada hal-hal lain yang bisa berkembang dari Rapat Kerja hari ini.

Yang pertama, terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023,  
Yang kedua membahas program kerja tahun 2024, dan  
Yang ketiga membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023.

Ini tentu agenda yang sudah ditulis dan diagendakan, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama.

Para Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Yang kedua, kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan bagi Bapak-Ibu yang melaksanakan. Teriring doa, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan diterima amal ibadah kita di bulan ramadhan. Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan, karena perbedaan agama atas *support*, dukungan dan partisipasinya sehingga kehidupan keberagaman kita bersama betul-betul menjadi contoh untuk kehidupan keagamaan bukan hanya bagi Indonesia tapi dunia.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang berikutnya, ingin kami laporkan sesuai dengan agenda, yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023. Sebagaimana dimaklumi Bapak-Ibu sekalian, alokasi dan realisasi anggaran 2015 sampai 2023 pada RPJMN di periode sekarang, itu total serapan realisasinya sejak 2015 sampai 2023 mencapai 84,75%, memang belum 90%, karena di awal-awal 2015, 2016, itu penyerapan di bawah 80%, baru 2017 naik 88. Kemudian 2018 ke atas sudah di atas 90% dan hari ini penyerapan kita 98,13% untuk tahun anggaran atau realisasi anggaran tahun 2023.

Sedangkan kalau ditilik dari kinerja serapan anggaran, salah satu ukuran kinerja, bukan satu-satunya ukuran kinerja, tahun 2023 sebesar 93,13%, dimana realisasi ini atau serapan kinerja serapan ini masih lebih rendah dari rencana penarikan dana, RPD pada DIPA yaitu sebesar 100% kekurangannya atau lebih rendah 1,87%, dengan rincian sebagaimana dipaparkan Inspektorat Jenderal 98,53%, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan 98,69%, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi

dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 95,48%, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 99,46%, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 99,05%, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 98,20%, kemudian Sekretariat Jenderal 98,84%, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 98,57%, total 98,13%.

Apabila disandingkan dengan kinerja serapan anggaran tahun 2020..., 2022 *alhamdulillah* realisasi Kementerian Desa, PDTT tahun anggaran 2023 sebesar 98,13% dan ini lebih tinggi 1,67% dari serapan pada tahun anggaran 2022. Mudah-mudahan di akhir periode Pak Presiden Jokowi nanti 2024 ini, serapannya bisa meningkat lagi, sehingga terus kinerja serapan anggarannya mengalami peningkatan.

Bapak-Ibu sekalian,  
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, kita akan laporkan program kerja tahun anggaran 2024 dengan pagu alokasi sebesar Rp2.765.969.080.000,00 dan tahun 2024 ini kita masih terkena kebijakan *automatic adjustment* belanja K/L sebesar 7,2% dari pagu total atau 8,2% dari pagu rupiah murni, karena *automatic adjustment* tidak dikenakan pada *loan* ataupun hibah, hanya untuk rupiah murni. sehingga *automatic adjustment* tahun 2024 sebesar 199.180.871.000 dari pagu Rp2.765.969.080.000,00.

Sedangkan sumber belanja *automatic adjustment* tahun 2024 itu yang pertama bersumber dari rupiah murni tidak boleh dari *loan* atau pinjaman maupun hibah. Yang kedua, dari belanja honor, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja barang operasional atau non-operasionalnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, kegiatan yang saat ini blokir ada di halaman 4A DIPA dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I tahun 2024. Artinya, *automatic adjustment* ini hanya diambilkan untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat. Dengan demikian program-program yang terkait dengan aspirasi dan juga terkait dengan pelayanan langsung masyarakat *Insyah Allah* masih tetap bisa dijalankan.

Bapak-Ibu sekalian,  
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Dari seluruh unit kerja Eselon I masing-masing ada kena *automatic adjustment* dengan total seperti yang saya laporkan tadi 199.180.871.000, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam laporan halaman 11, tidak perlu saya bacakan, karena di situ sangat detail untuk dicermati bersama-sama, sedangkan *output* prioritas tahun 2024 ini juga sudah pernah kita laporkan. Nanti mohon dapat pencermatan dan tentu ini juga diantara-diantaranya

adalah aspirasi dari Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang sampai hari ini, Pak Ketua, Pak Pimpinan belum 100% masuk.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon dengan sangat agar nanti realisasinya betul-betul sesuai dengan harapan Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, aspirasi yang masih belum masuk segera bisa dimasukkan. Kalau tidak salah baru 30% yang masuk, ini pada sudah pada posisi bulan Maret 2024.

Bapak-Ibu sekalian,  
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, kita laporkan bagian yang ketiga hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023. *Alhamdulillah*, capaian opini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak periode 2016 sampai 2022, itu laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan sejak 2020, 2021 dan 2022, laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri juga diaudit oleh BPK dan *alhamdulillah* Kementerian Desa juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini semua tidak lain karena sinergitas, arahan dan tentu pengawasan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati. Sedangkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tahun 2000, semester I tahun 2023, sudah langsung kita tindaklanjuti hasil pemeriksaannya dengan alur tanggal 24 Mei 2023, LHP BPK RI disampaikan, kemudian 10 Juli diserahkan dan 31 Juli sudah kita terbitkan memorandum dan surat Menteri Desa tertanggal 31 Juli sebagai tindak lanjut LHP BPK, 56 memorandum menteri dan 14 surat menteri, sehingga waktunya juga sangat pas dengan tahapan yang memang menjadi arahan BPK.

Dengan demikian pada saat ini langkah-langkah untuk tindak lanjut itu sudah bisa kita laporkan sampai dengan per Maret 2024. Jadi tindak lanjut kita sudah bisa dilaporkan sampai dengan per 1 Maret 2024 dan tentu ini terus kita lakukan sesuai dengan rekomendasi atau tindak apa temuan hasil pemeriksaan. Tentu ikhtiar-ikhtiar ini juga menjadi bagian penting dari agar pemeriksaan di 2024 nantinya juga bisa mencapai wajar tanpa pengecualian dan itu adalah sebuah keniscayaan yang selalu diupayakan oleh kita sebagai wujud dari tahapan akhir dari kepemimpinan Pak Presiden Jokowi.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang terakhir, kita laporkan terkait hambatan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yaitu temuan pada Satker-Satker daerah. Ini yang sering kali menjadi kendala untuk percepatan, karena ini memerlukan waktu untuk koordinasi, kadang-kadang ada pergantian kepala dinas dan lain-lain. Kemudian proses pemanggilan dan penandatanganan surat keterangan tanggung jawab mutlak pada pihak ketiga dan temuan perorangan pegawai juga memakan waktu yang cukup lama dalam proses negosiasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaannya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

*Waalaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Menteri.

Demikian penjelasan Pak Menteri.

Sekarang masuk kepada agenda pendalaman Anggota yang terhormat. Di sini sudah terdaftar masing-masing yang pertama ada Pak Muhammad Aras.

Silakan Pak Aras.

**F-PPP (DR. H. MUH. ARAS, S.PD., M.M.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan, dan  
Teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri,  
Pak Dirjen,  
Pak Sekjen, dan  
Seluruh hadirin yang sama berbahagia,

Pertama-tama, tentu kami berterima kasih kurang lebih 4 tahun bermitra dengan Kementerian Desa yang juga menyambungkan kami dengan konstituen kami di lapangan, *alhamdulillah*, walaupun tidak terlalu maksimal, tapi sampai hari ini kami juga bisa berkomunikasi lebih banyak di masyarakat karena ada program-program yang diberikan atau dari mitra kita Kementerian Desa, *alhamdulillah*, sehingga kami tentu mendapatkan manfaat dari program-program yang selama ini kita usulkan di Kementerian Desa. Oleh karenanya, di waktu mendatang tentu kita harapkan bahwa Kementerian Desa ini bisa bersama-sama meningkatkan anggarannya, sehingga



kemanfaatannya kepada masyarakat lebih dibanding dengan beberapa tahun terakhir ini yang memang anggarannya sangat terbatas.

Yang kedua, apresiasi terhadap kementerian yang mendapat lagi WTP, semoga ini terus dipertahankan sehingga hal-hal yang tentu akan mengakibatkan permasalahan di internal kementerian dapat dihindari.

Kemudian yang selanjutnya adalah program-program untuk 2024 ini. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan, bahwa sebelum-belum semua usulan teman-teman juga sudah terdaftar, sehingga kami juga melihat bahwa ada penurunan yang signifikan program-program yang tentu yang bisa kami usulkan. Ya, semoga sisa anggaran yang tidak terpakai 2023 bisa dimasukkan sebagian ke program-program padat karya, sehingga apa yang kami janjikan kepada masyarakat yang tentu akan berakhir di 2024 ini, *Insy Allah*, kami bisa penuhi, terutama terkait dengan BUMDes, karena BUMDes ini ternyata sangat besar manfaatnya untuk kepentingan, kesejahteraan masyarakat kita, di mana di desa ini bisa menggeliat bisnis banyak perputaran uang dengan hadirnya BUMDes yang paling tidak menjadi contoh dan menjadi pelecut bagi usaha-usaha yang ada di pedesaan. Oleh karenanya, ini wajar kalau ditingkatkan anggarannya, sehingga masyarakat desa bisa lebih betah tinggal di desanya untuk berusaha dibanding ke tempat yang lain atau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Kemudian yang selanjutnya adalah tentu program-program yang selama ini yang diberikan oleh Kementerian Desa sifatnya kecil-kecil. *Nah*, ke depan kita harapkan bahwa dirubah sedikit ke yang lebih tuntas, misalnya permasalahan kemiskinan desa misalnya. Ya, lebih baik dituntaskan sekaligus di satu lokasi dibanding dengan hanya diberikan perhatian sedikit demi sedikit, sehingga tidak meninggalkan bekas yang mendalam bagi pembinaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.

Oleh karenanya, tentu ke depan di samping anggaran memang kita sepakat untuk kita tingkatkan, juga pemanfaatannya juga harus dimaksimalkan.

Dan yang terakhir tentu kami juga ingin untuk periode berikutnya sampai 2025 nanti pembahasan-pembahasan yang kita lakukan selama di 2024 ini tentu selalu kita pikirkan bagaimana masyarakat desa ini mendapatkan perhatian lebih, sehingga kehadiran Kementerian Desa ini sangat dinantikan oleh masyarakat kita dan masyarakat desa ini merasasangat mendapatkan manfaat dari kementerian yang ada.

Barangkali itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalikumsalam.*

Terima kasih, Aras.

Pak Tamanuri, silakan, Pak.

**F-NASDEM (DRS. H.TAMANURI, M.M.):**

Makasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Dewan,  
Yang saya banggakan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,  
Hadirin yang berbahagia,

Tentunya saya tidak berkelebihan kalau mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada kami, walaupun ya kecil-kecil tapi banyak manfaatnya, kemudian bisa menyebar, macam-macam, terutama desa wisata yang penggunaannya luar biasa untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Ini bagi yang sudah maju luar biasa itu dan kelihatannya hampir 90% memang tepat, tepat penggunaannya.

*Nah*, kemudian selain daripada itu, kami melihat tadi grafik peningkatan persentase pekerjaan Bapak luar biasa, enak ngelihatnya, jadi *ndak* ada yang datar kan, naik semua, hebat Bapak, enak ngelihatnya, sampai mencapai 98,13. *Nah*, ini berarti tidak luput dari manajemen yang Bapak lakukan. Oleh karena itu, tidak berkelebihan saya apresiasi ini.

Kemudian yang agak aneh itu adalah adanya kelebihan-kelebihan pembayaran pekerjaan fisik, adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji- gaji, adanya kelebihan pembayaran terhadap perjalanan dinas. *Nah*, ini-ini kami mohon penjelasan Bapak, kenapa bisa begini ya? seperti fisik, apa kita punya Direktur Keuangan kita *nggak* menghitung, kasih-kasih aja setelah kemudian dipertimbangkan setelah dihitung kemudian ternyata ada kelebihan. *Nah*, ini kalau kekurangan saya setuju, Pak, tapi kalau kelebihan nih sedih saya duit kita hilang, ya *nggak* hilang *sih* kembali tentunya mereka masih ada kemauan sama kita.

Kemudian selain daripada itu, yang mungkin perlu diperhatikan lagi walaupun saya pada tahun yang lalu itu mendapat 6 titik untuk pembangunan jalan di daerah transmigrasi, sampai... transmigrasi ini lain, kita yang mendatangkan, kita memaksa orang untuk masuk, tapi setelah dia masuk kita terlantarkan, *nah* ini yang sedih kita. *Nah*, oleh karena itu, walaupun sedikit-sedikit berilah kami nih apa 6 titik apa 5 titik sehingga mereka itu merasa di-*nguwongke*, jangan-jangan ada bedanya antara desa transmigrasi dengan desa penduduk asli.

*Nah, saya rasa demikian, Pak, nggak banyak-banyak.*

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam,*

Makasih, Pak.

Pak Hamka B. Kady.

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri,  
Pak Sekjen, dan  
Seluruh Dirjen yang hadir beserta jajarannya,

Saya sebenarnya tidak apa namanya bersemangat mengomentari, Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih saja dulu atas seluruh bantuan-bantuan dan atas seluruh program-program yang dipikirkan kita bersama, itu sangat bermanfaat di daerah-daerah. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa seluruh desa pasti sangat berharap lagi dan lagi mengenai pembangunan selanjutnya.

Tapi apa yang menyedihkan saya merasa tidak bersemangat, melihat *automatic adjustment* ini yang cukup tinggi. Saya juga tidak tahu apa dipikirkan Menteri Keuangan. Di sini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini 160 miliar *automatic adjustment*, bayangkan itu apa yang dikurangi di situ. Jujur saya katakan sebenarnya di dalam teori penganggaran itu sebenarnya tidak ada *automatic adjustment*, aneh-aneh sebenarnya. Kenapa tidak sekalian sebelum dilakukan *automatic adjustment* ya memang dipotong anggarannya segitu aja, tapi tidak usah kita persoalkan, ini adalah pekerjaan rumah ke depan dan tahun ini tahun yang paling barangkali agak sulit di dalam mengelola keuangan kita, itu kami paham.

Saya melihat pengembangan sumber daya manusia di sini 160 miliar, Pak. Pak Menteri apanya yang di apanya yang dikurangi di sini, luar biasa besarnya itu loh ya. *Nah*, oleh karena itu, catatan-catatan kami yang ada dan kami sudah usulkan, mohon saja disesuaikan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan.

Tahun ini Pak Ketua, barangkali kita tidak bisa berharap banyak melihat kondisi-kondisi keuangan kita belum apa-apa, sudah otomatis pasti dikurangi, namanya *automatic adjustment* ya. Saya membuka-buka teori anggaran, *kok* di mana istilah ini, *nggak* ada. Oleh karena itu, saya hanya memberikan apresiasi saja kepada Pak Menteri agar supaya ke depan kita manfaatkan seoptimal mungkin apa yang ada.

Selanjutnya Pak Menteri, tolong di-*clear*-kan juga isu yang di luar mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, apakah benar itu sudah disetujui, karena berdasarkan laporan yang saya terima di Baleg dan pemerintah sudah menyetujui perpanjangan masa jabatan 8 tahun. Bahkan saya dapat fotokopi surat yang ditanda, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasco, meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar supaya semua kepala desa yang berakhir masa jabatannya harus diperpanjang otomatis, tidak perlu ada pemilihan. Ini tentu gawenya Kementerian Desa, tapi namun demikian Pak Menteri juga punya kewenangan di situ, di dalam membina kepala desa. Ini tertulis Pak Menteri, dari DPR, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Di semua kepala desa bertanya, apa betul karena belum diundangkan juga hanya secarik kertas dari DPR meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar supaya seluruh kepala desa yang berakhir masa jabatannya tidak dilakukan pemilihan kepala desa, itu inti surat dari DPR, Pak Menteri. Oleh karena itu, ini yang menjadi pekerjaan rumah juga nanti ke depan bagaimana pun juga Pak Menteri punya kewenangan juga di dalam membina kepala desa.

Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, titipan saya kepada seluruh Dirjen, Pak Menteri, tolong dioptimalkan usulan-usulan yang kami telah ajukan karena jujur juga saya katakan, bahwa usulan itu muncul karena janji-janji politik kami pada saat kampanye yang lalu. Tolong jangan sampai terabaikan, karena bagaimanapun juga sama halnya Presiden mempersiapkan anggaran untuk janji-janji politiknya. Ini saja yang perlu saya garis bawahi dan tekankan, bahwa tolong dipikirkan baik-baik semua usulan- usulan kawan-kawan termasuk saya apabila memungkinkan, tetapi kalau tidak memungkinkan mari kita bicarakan dengan baik secara teknis, ya agar supaya bisa juga kita menjawab kepada kepala desa dan seluruh rakyat yang ada di desa bisa kita jelaskan dengan baik.

Saya kira itu saja Pimpinan, saya tidak terlalu jauh melihat lagi detailnya karena saya tidak bergairah rasanya membahasnya, karena mengganggu pikiran-pikiran kita yang ideal.

Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

*Billahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam,*

Pak Anwar Hafid.

**F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera buat kita sekalian.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi V,  
Pak Menteri, dan  
Seluruh jajarannya,

Pada kesempatan yang baik ini, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran kementerian yang telah melaksanakan seluruh kegiatan 2023 sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan, tentu sangat menggembirakan buat masyarakat kita. Cuman ya sekali lagi Pak Menteri kita apa yang disampaikan oleh Pak Hamka sebetulnya masyarakat menunggu begitu banyak peningkatan volume, tapi karena anggaran yang terbatas *alhamdulillah* disyukuri apa yang ada, Pak Menteri.

Yang kedua, berkaitan dengan program 2024, ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama terkait dengan BUMDes. Sebetulnya program ini adalah salah satu program yang sangat baik dan tentu ini adalah salah satu hal yang merupakan strategi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat desa.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, Pak Menteri, sebetulnya salah satu *problem* di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang kita kenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tapi di satu sisi kita juga melihat, bahwa angka kemiskinan di daerah itu masih cukup tinggi. Saya kalau coba melihat di lapangan, ada industri yang sangat besar, *smelter-smelter* ada di sana, tapi angka kemiskinan masih begitu tinggi. Saya melihat bahwa, ada satu *problem* yang menyebabkan itu karena UMKM-UMKM kita ini belum bisa nyambung dengan industri yang besar itu, belum bisa *connect* maksudnya.

*Nah*, saya melihat bahwa, kehadiran sesungguhnya inilah hal yang bisa kita jadikan perantara antara UMKM dan industri-industri besar itu. Dishub BUMDes bisa menjadi *home seller* sebetulnya kalau kita benar-benar memberi perhatian pemberdayaan bagi BUMDes itu sendiri. Maka oleh

karena itu, ke depan, Pak Menteri, saya menyarankan supaya pemberdayaan BUMDes di seluruh Indonesia ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena dengan cara inilah UMKM-UMKM kita yang ada di daerah itu bisa memanfaatkan kehadiran industri-industri besar yang ada di Indonesia ini.

Kita sering melihat di lapangan industri besar ini kan kalau tidak ada tekanan kekuasaan pasti mereka akan berbuat seenaknya, Pak Menteri, *supplier-supplier* sekecil apapun juga semua dari luar daerah misalnya, mereka tidak peduli kecuali yang mereka takut itu adalah kekuasaan, maka pintu masuk kita kekuasaan itu adalah melalui BUMDes. Kalau semua BUMDes kita berdaya, saya yakin dan percaya bahwa UMKM-UMKM kita akan hidup sehingga daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat di lapangan, itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan transmigrasi, Pak Menteri. Adabeberapa kasus yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri terkait dengan lahan transmigrasi. Di Morowali itu, Pak Menteri, ada beberapa transmigrasi yang masih bermasalah, waktu saya di Komisi II ini juga sering saya sampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional karena ada beberapa lahan transmigrasi, kawasan transmigrasi, Pak Menteri, yang sampai hari ini sertifikatnya belum ada, itu mereka sudah bercucu di situ tinggal belum ada sertifikat.

Contoh misalnya, transmigrasi di Buleleng yang ada di Kabupaten Morowali. Dulu waktu, karena saya waktu itu yang mengusulkan transmigrasi di situ, Pak Menteri, daerah itu belum masuk kawasan hutan, kemudian tiba-tiba tahun 2020, 20 ini kalau tidak salah terjadi perubahan kawasan hutan, lahan transmigrasi itu masuk di dalam kawasan hutan, otomatis BPN tidak berani mengeluarkan sertifikat. Ini mohon, Pak Menteri, ini menjadi perhatian khusus, karena kasihan masyarakat kita yang sudah tinggal di daerah itu tapi tidak memiliki alas hak.

Kemudian yang kedua, ada lahan transmigrasi juga di daerah pertambangan. *Nah*, ini juga saya sarankan, saya sampaikan kepada Pak Menteri bisa juga koordinasi dengan Kementerian Pertambangan. Karena masyarakat kita itu seakan-akan lebih kuat itu izin usaha pertambangan daripada kawasan transmigrasi, padahal transmigrasi itu datang ke sana itu atas perintah negara ya, bukan atas keinginan mereka sendiri misalnya. Ini sangat miris, ini tumpang tindih dengan lahan PT Vale yang ada di Kabupaten Morowali ya.

*Nah*, kemudian juga izin-izin pertambangan yang lainnya seperti kasus baru-baru ini salah seorang kepala desa kita harus ditahan karena berhadapan dengan pemilik izin usaha di mana mereka punya sertifikat di dalam kawasan itu, kawasan pertambangan.

Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak Menteri, Sulawesi Tengah itu kalau tidak salah sudah daerah tertinggalnya

sudah keluar semua ya Pak, terima kasih, *alhamdulillah*. Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan desa-desa juga menjadi perhatian kita, desa-desa yang masih tertinggal itu mungkin dalam secepatnya juga kita entaskan Pak Menteri karena malu-malu juga kita, Indonesia yang hebat ini tapi masih ada daerah desa-desa tertinggal. Kalau saya Presiden Pak Menteri, maka menteri yang paling saya berikan anggaran sebesar-besarnya itu Kementerian Desa ini Pak, karena daerah desa inilah sesungguhnya soko guru kita, pembangunan kita itu ada di di desa, tapi sayangnya gak tau kebijakan pemerintah.

Semoga ke depan ini Presiden yang baru kita bisa memberi perhatian khusus yang lebih besar kepada Kementerian ini. Saya kira itu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wallahu musta'an,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam,*

Pak Sudewo, silakan Pak Sudewo.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan yang saya hormati,  
Kawan-kawan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri Desa dengan seluruh jajarannya yang saya banggakan,

Saya ini bertanya hanya sebagai sarana untuk komunikasi saya dengan Pak Menteri saja sesungguhnya, karena lama tidak ketemu, lama *nggak* komunikasi, ada rasa kangen, ada rasa rindu, kalau ada pertanyaan ini, itu paling tidak bisa terobati begitu, karena kayaknya sudah dua tahun *nih,ndak* ada komunikasi dengan Pak Menteri ,gitu.

Saya syukur *alhamdulillah*, kinerja Kementerian Desa ini luar biasa jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, tahun 2023 ini signifikan. 2022 itu sebenarnya sungguh luar biasa, karena capaiannya 96 sekian persen ya, tapi 2023 masih bisa naik lagi sebesar 98 koma sekian persen, nyaris 100%. Ini kalau tidak kinerja Pak Menteri dengan seluruh jajaran, seluruh stafnya baik tidak mungkin akan mencapai ini, termasuk juga penilaian dari eksternal, dari BPK WTP lagi, sangat tidak diragukan Pak Menteri Desa ini, meskipun presidennya baru *Insya Allah* dan saya berharap bisa dipakai kembali ini menjadi Menteri Desa ini.



Kalau tepuk tangan ini berarti doa kita bersama, seperti yang Pak Anwar sampaikan tadi, bahwa mudah-mudahan Presiden kita perhatian terhadap kebijakan transmigrasi, menyebutnya Presiden kita berarti Presidennya Pak Menteri Desa juga, meskipun kemarin berbeda, tapi sekarang ini juga Presidennya Pak Menteri Desa. Kita ini memang harus- harus bersatu, harus kompak begitu untuk membangun bangsa dan negara.

Pak Menteri, sebagaimana yang disampaikan kawan, Kementerian Desa ini sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat di pedesaan. Mayoritas masyarakat Indonesia itu berada di pedesaan, mungkin ya sekitar 80% itu berada di desa. Jadi bagaimana upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa melakukan pembangunan ya di desa-desa itu sebagai pilar pembangunan nasional.

Kementerian Desa hanya diberi di slot anggaran yang sangat sedikit, sangat sedikit, tapi itu mestinya tidak mengurangi upaya Pak Menteri dalam rangka Kementerian Desa yang benar-benar posisi strategis untuk pembangunan nasional yang memang benar-benar masyarakat desa sangat berharap eksistensi kebijakan dan program dari Kementerian Desa.

APBN-nya memang kecil sekitar 3 triliun, tapi kalau Pak Menteri Desa dengan seluruh jajarannya ini melakukan inovasi dan kreativitas dalam bentuk program dan kebijakan yang menyentuh kepada masyarakat desa, yang menyentuh terhadap pergerakan perekonomian desa baik di desa pedesaan, baik di desa tertinggal, maupun di wilayah atau area transmigrasi itu dengan sumber pendanaan yang tidak kalah strategis dari APBN yaitu *loan* pinjaman luar negeri.

Kementerian-kementerian yang lain itu juga mempunyai konsep, mempunyai inovasi dan kreativitas dengan adanya program dan kebijakan yang dia rancang supaya institusinya benar-benar bisa hadir dirasakan oleh masyarakat itu juga sumber pendanaannya dari *loan* atau dari pinjaman luar negeri.

BMKG saja, BMKG itu pengajuan *loan* yang sekarang ini sedang berproses dan bahkan sebagian sudah cair itu, itu mencapai sekitar 16 triliun, itu BMKG, apalagi Menteri Desa. Kalau Kementerian Desa ini punya konsep pengembangan wilayah transmigrasi itu menjadi satu area yang modern dengan segala fasilitas yang ada di sana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan segala macamnya, termasuk kekurangan-kekurangan pembangunan di wilayah desa dan pedesaan yang tidak bisa ditumpang oleh anggaran dari pemerintah daerah baik APBD kabupaten maupun APBD provinsi maupun pusat, itu bisa di-*support* pendanaan dari pinjaman luar negeri.

Saya kira ini menarik dan akan mendapatkan kajian juga akan mendapatkan respon dari Bappenas dan dari Kementerian Keuangan, hanya bagaimana konsep yang harus dibangun oleh Kementerian Desa itu, sehingga perekonomian sebagai ekonomi desa mandiri itu bisa terealisasi, infra



pembangunan infrastruktur yang mengalami ketertinggalan selama ini juga akan bisa segera dilengkapi. Kemudian *stunting* itu bisa dihindari, fasilitas pendidikan karena Kementerian Desa itu sesungguhnya dalam undang-undang, Undang-Undang Pedesaan itu mencakup segala aspek, segala sektor pembangunan, itu bisa dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Belum lagi yang di wilayah transmigrasi yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus.

Jadi, saya mendorong Kementerian Desa untuk melakukan inovasi dan kreativitas dengan menghadirkan konsep meskipun pendanaan itu harus dari luar negeri. Itu adanya konsep tersebut yang memang akan membawa pembangunan di desa, sehingga bisa mendongkrak perekonomian secara nasional, saya yakin akan direspon oleh Bappenas dan akan direspon oleh Kementerian Keuangan. Karena kinerjanya, Pak Menteri, ini bukan main-main ya, hampir 100%. jadi kalau ada masukan seperti ini saya kira itu Pak Menteri tidak akan menysia-nyiakkan, karena niatnya Pak Menteri ini baik untuk bangsa dan negara kita.

Saya kira itu Pimpinan. saya hanya untuk membangun komunikasi aja dengan Pak Menteri Desa.

Mudah-mudahan masukan saya ini bisa menjadikan perhatian.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F- PG):**

*Waalikumsalam.*

Bu Sri Rahayu.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,  
Pak Menteri,  
Pak Sekjen,  
Pak Dirjen, dan  
Seluruh jajaran,

Langsung saja, yang pertama menyambung apa yang disampaikan Pak Aras, bahwa kalau saya melihat yang ada di sini program-program yang memang diusulkan melalui kita ini rupanya jauh menurun seperti misalnya

desa wisata di sini hanya 56 desa, padahal Anggota Komisi V ini ada 53 ya, 53 apa 54 gitu, 54, ini perlu pemikiran.

Demikian juga untuk BUMDesa hanya 200, yang anggarannya 9...19 koma. Kalau desa wisata ini ada 24,6 per desanya, kalau saya hitung 439, ini artinya turun dari sebelumnya. *Nah*, ini mungkin perlu penjelasan nanti juga, termasuk BUMDesa juga kalau saya hitung dari 200 itu 96.500.000, kemudian ada lagi pengembangan BUMDesa bersama itu ada 50, anggarannya 94 Juta.

Oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian, karena hanya 200. Apapun kita ini dari Kemendes hanya itu *loh*, Pak, *nggak* ada yang lain *loh*. Jadi kalau kalau *nggak* ada, *nggak* ada yang kita bawa, kita hanya jadi tukang stempel aja di komisi ini, setuju atau *nggak* setuju, gitu aja. Artinya tidak ada, tidak adaapa yang kita berikan kepada konstituen kita yang ada di Dapil masing-masing. Saya kira ini menjadi perlu dipertimbangkan, sehingga kita tetap ada, termasuk pasar desa ini ya, pasar apa namanya, desa kalau *nggak* salah itu juga perlu adanya ada tiga kalau *nggak* salah, kalau saya, saya lihat di situ, untuk itu mohon perhatiannya. Ada enam unit ya untuk desa.

Kemudian justru yang fasilitasi investasi daerah-daerah tertinggal dan seterusnya itu anggarannya cukup lumayan besar ada 1 miliar, ini mohon penjelasan juga termasuk promosi produk unggulan desa itu juga ada sekian miliar, hanya tiga provinsi, tolong ini juga menjadi perhatian dan penjelasan untuk kami.

Kemudian selanjutnya untuk khususnya pembangunan-pembangunan yang ada di, ini yang ada halaman 16, ada halaman 16, itu banyak program-program yang memang untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Ini anggarannya kan kecil sekali ya, Pak ya, kalau menurut saya, karena ini percepatan pembangunan, sehingga ini juga menjadi perhatian. Contohnya misalnya, pembangunan sarana air bersih di kawasan perbatasan satu unit, memang anggarannya 1,54 miliar ini, ini sampai apa ini anggaran itu. Tolong hal-hal semacam ini kami menjadi perhatian.

Kemudian yang berikutnya, Pak, yang sangat penting ini menurut saya perlu. Kita punya pendamping desa ini 35.000, memang ada yang satu pendamping dua desa atau satu desa. Yang ingin saya pertanyakan, Pak, saya mungkin sebelumnya pernah menyampaikan juga kepada inspektorat tentang pengawasan terhadap kinerja dari pendamping. Pertanyaan saya di mana sebenarnya letak kesalahannya? mohon maaf ini terpaksa saya menyinggung terkait dengan kampanye di Pilpres kemarin.

Ada aparat yang menekan kepada kepala desa untuk membuat sebuah video yang kemudian dan dilaporkan dan sekaligus untuk melakukan apa namanya, deklarasi pada calon pasangan calon presiden tertentu, kemudian ketika mereka tidak mau berikutnya mereka ditekan, dipanggil secara formal bahwa kalian punya masalah di 2020. Kenapa ini saya-saya kaitkan dengan pendamping? artinya kalau ini ada masih ada, sehingga

kepala desa itu takut karena punya masalah, artinya ini ketika memberikan laporan keuangannya berarti ada kesalahan *dong*, padahal laporan itu ada pendampingan terhadap ada pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping.

Kalau seluruh Indonesia seperti ini, ketakutan seperti ini, karena memang di dalamnya berarti ada kesalahan, kesalahan di dalam membuat laporan atau penggunaan atau pengelolaan keuangannya. Lalu posisinya kemudian fungsi dari pendamping desa apa di sini. Oleh karena itu, menjadi perhatian penting, jangan sampai kalau mereka kepala desa itu *nggak* punya salah, pasti dia akan berani melakukan apapun, ditekan siapapun pasti dia akan berani dan ini sebagian besar tidak berani, sehingga melakukan dan yang tidak melakukan kemudian dipanggil, dicari-cari lagi tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, bahkan. Artinya perlu pembinaan, perlu dipertanyakan juga bagaimana posisi pendamping ini dan ini bukan-bukan saya omong kosong, tapi *real* ini *real* seperti itu ada menyampaikan kepada kami. Seluruh Indonesia *loh*, Pak, pada takut loh, padahal ini anggarannya juga tidak sedikit 1,5 T untuk pendamping. Saya tidak menyalahkan pendampingnya, tetapi bagaimana kinerjanya dan mungkin pengawasan terhadap ini seperti apa, gitu. Ini menurut saya penting sekali untuk ditindaklanjuti, sehingga ke depan tidak ada ini, tidak ada alasan kemudian para-para kepala desa ada ketakutan karena melakukan kesalahan yangselama ini padahal sudah membuat laporan keuangan kepada, saya *nggak* ngerti laporan keuangannya ke mana.

*Nah*, oleh karena itu, mohon ini Pak Menteri yang punya anak buah para pendamping di sini, tolong ini betul-betul menjadi perhatian, jangansampai ke depan akan terjadi lagi. Bahkan ini di sini ada anggaran untuk peningkatan kapasitasnya barangkali di sini, ini peningkatan kapasitas pendamping desa ada 10.000 orang, paling tidak secara bertahap. *Nah*, oleh karena itu, tolong ini menjadi perhatian penting bagi kita, jangan sampai kepala desa menjadi korban untuk itu dan anggaran dana desa ini sepertinya barangkali ke depan harapannya semakin naik angkanya.

Oleh karena itu, tolong Pak Menteri, ini menjadi perhatian supaya tidak terjadi hal-hal semacam ini. Mau *nggak* mau saya mengaitkan kemarin, karena memang ini kepala desa gitu dan laporan keuangan terkait dengan dana desa.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalikumsalam,*

Makasih, Bu Sri.

Yang terdaftar di sini sudah bicara semua kecuali yang...yang hadir tapi belum bicara, Pak Harvey mau bicara? *Pass*, Pak Tubagus? *pass*. Pak Ilham?

Silakan, Pak Ilham.

**F-PG (ILHAM PANGESTU):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Menteri dan jajarannya,

Saya mau bertanya gini, Pak. Pada tahun 2023 pembahasannya itu terus terang saya *nggak* ngikutin, Pak, ngusulan usulan, aspirasi juga saya tidak ikut, karena sibuk di Dapil, Pak, sibuk di Dapil. *Nah*, sekarang mau tanya bagian Aceh itu sama siapa, Pak? saya mau nanya, Pak, tentang jelasnya, Pak, usulan kita masuk atau tidak? terus apa saja aspirasi yang ada di Dapil saya? mungkin itu, Pak, tolong dijelaskan sama siapa saya harus bertanya. Saya bingung karena karena terus terang 2023, kami diperintahkan *sret*, ngurusi Dapil.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Ilham.

Mungkin Bu Estu ada? Bu Estu? Silakan, Bu.

Pak Eddy? cukup, Pak Ruslan ada? Ya?

Cukup ya, baik.

Pak Menteri, saya hanya ingin memperdalam apa yang disampaikan Bu Sri saja. Memang ini Bu Sri ini perlu di-di apa dicermati *nih*. Kalau kita lihat kita punya pendamping, kan semua ada pendamping desa di seluruh Indonesia, tapi kepala desa itu *kok* takut dengan bupati, pemeriksaan, gitu. Ini sederhana, tapi ini yang perlu dicermati, kasihan kepala desa kita. Mereka hidup dalam apa namanya ya, mungkin lebih-lebih tepat ketakutan mereka, ini musti dibina mereka, Pak Menteri, supaya mereka betul-betul merdeka ya.

Mereka itu menikmati jabatan mereka sebagai kepala desa dan mereka menikmatinya dengan baik tanpa ada beban, tekanan-tekanan tertentu yang pada akhirnya membuat mereka terancam, gitu, kalau mereka benar-benar laporan pertanggungjawabannya adalah benar apa adanya

sebagaimana mekanisme yang ada yang diatur oleh negara, kita yakini bahwa mereka itu akan aman-aman saja. Itu mohon binaannya Pak Menteri itu kira-kira penyampaian saya dari untuk Pak Menteri.

Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri untuk menjelaskan.  
Silakan Pak Menteri.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):**

Terima kasih.

Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Banyak sekali masukan, nanti tentu akan kita pertegas dan rinci dengan dengan laporan tertulis, namun beberapa hal secara umum inginsaya respon.

Yang pertama, Pak Aras, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian perubahan terkait dengan besaran anggaran supaya lebih fokus dan tuntas, kita sepakat supaya tidak ngambang. Tentu ini konsekuensinya terkait dengan upaya untuk peningkatan anggaran ke depan.

Kemudian, Pak Tamanuri, terkait dengan *kok* masih ada temuan terkait dengan kelebihan pembayaran fisik, gaji, Perdin, keluhan Pak Tamanuri sama dengan saya. Saya itu tiap tahun itu juga ngeluh, ini *kok* memutar-mutar terus temuan itu, selalu ada Perdin, rasanya *kok nggak* pernah selesai, gitu. *Nah*, tapi kita *alhamdulillah* terus menurun, Pak, terus menurun meskipun ya masih ada pengulangan, masih ada pengulangan, tapi menurun gitu, mendinglah daripada pengulangan *nggak* menurun. Mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih maksimal lagi.

Kemudian terkait dengan program semuanya, baik itu daerah transmigrasi dan lain-lain, menurut saya masih ada waktu untuk dicermati lagi dan di-*switch* kalau misalnya ini *nggak* pas pindah ke sini, *monggo*, masih ada waktu, karena *toh* sampai hari ini juga usulan-usulan belum 100% masuk, termasuk Pak Ilham, nanti langsung nugasin anak buahnya ke Biro Oren, Biro Perencanaan, dan itu tiap...tiap tahun ada pertemuan, Pak Ilham.

Jadi pertemuan Biro Oren dengan tim dari Bapak-Ibu Anggota Komisi V setiap tahun. *Nah*, ini menurut saya memang supaya lebih pas lagi dengan harapan Bapak-Ibu dan dengan kondisi anggaran yang terbatas, *monggo* silakan ditata lagi, yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misalnya kalau program daerah tertinggal, ya tidak bisa di daerah yang tidak tertinggal misalnya, kemudian program yang bersentuhan dengan transmigrasi tentu tidak bisa ditaruh di tempat yang tidak ada transmigrasinya. Saya kira ini sudah menjadi apa aturan main yang tidak bisa kita langgar.

Kemudian *automatic adjustment*, ya itulah realitasnya, Pak Hamka, saya tidak bisa komentar banyak, kita hanya menerima aturan yang ditetapkan.

Kemudian terkait dengan masa jabatan, kita sudah pernah konfirmasi ke Kemendagri, Pak Hamka, masih dalam kajian merespon suratnya Pak DPR. Jadi belum-belum ada respon yang pasti, cuma ada kalimat begini dari Pak Dirjen di Kemendagri, implementasinya *nggak* mungkin sebelum undang-undang disahkan, karena itu undang-undangnya tetap 6 tahun 3 kali, kemudian perubahan 8 tahun 2 periode, ini *nggak* mungkin kalau sebelum betul-betul terjadi perubahan di revisi di undang-undang. Jadi masih tetap menunggu itu, itu penjelasan dari Kemendagri.

Kemudian Pak Anwar Hafid, nanti akan kita laporkan agak detail, Pak, memang *buanyak* masalah terkait dengan apa istilahnya, lahan apanamanya, lahan transmigran, apa namanya HPL, HPL, tapi sudah banyak progresnya, sudah banyak progresnya, masih tersisa sekian ribu hektar, gitu ya, yang belum selesai, tapi terus kita *update* dan kondisi objektif disampaikan Pak Anwar Hafid tadi, memang betul, bahkan ada yang harus pindah karena pertambangan.

Pak Dewo, terima kasih inspirasinya. Kita coba nanti menyusun untuk ke depan. Jadi pendanaan transmigrasi dari *loan* karena memang kecil sekali apa, anggarannya, apakah itu revitalisasi atau mungkin pembukaan lahan baru. Memang selama ini belum pernah ada pendanaan transmigrasi dari, dari *loan*. Pikirannya cukup maju dan makro, kayaknya lebih cocok jadi menteri daripada jadi bupati.

Bu Sri, *monggo* ditata lagi. Jadi ya adanya itu anggarannya, *nah, monggo* ditata, selama ini saya selalu menyampaikan begitu *monggo* ditata sebaik-baiknya dengan kondisi yang ada, ya adanya itu di..., dialokasikan sebaik mungkin sesuai dengan aspirasi yang selama ini juga sudah ditampung oleh Bapak-Ibu sekalian.

*Nah*, sekaligus terkait dengan kondisi tadi yang disampaikan Bu Sri, sama diperdalam oleh Pak Pimpinan. Memang pernah menjadi pemikiran kita mungkin *nggak* pendamping ini ditambahi kewenangannya, tugasnya untuk melakukan pendamping pelaporan keuangan dana desa. *Nah*, kayaknya tidak mungkin, karena itu keluar dari kewenangan pendamping. Jadi kalau pendamping terus dikasih tambahan tugas melakukan pendampingan kepala desa di dalam melaporkan pemanfaatan dana desa, itu keluar dari tugas pendamping yang utama yaitu pendampingan di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan pelaporan pemanfaatan dana desa, karena itu nanti akan berbenturan dengan inspektorat, akan berbenturan dengan kewenangan-kewenangan yang sudah ada.

*Nah*, sehingga sampai hari ini memang belum ada kewenangan yang diberikan atau tugas yang ditambahkan kepada pendamping untuk melakukan pendampingan di dalam pelaporan pemanfaatan dana desa.

Perencanaan iya, kemudian pengumpulan data terkait dengan kepentingan perencanaan, pengumpulan masalah dengan terkait perencanaan iya, tapi pelaporan itu sama dengan posisi di misalnya DPRD, itu juga tidak punya kewenangan pendampingan di dalam menyusun laporan, karena itu butuh aturan tersendiri, teknis tersendiri yang tentu tidak mudah.

*Nah*, memang pernah terpikir untuk itu supaya meringankan beban pelaporan tetapi agak melampaui tugas kewenangan yang ada di dalam undang-undang regulasi terkait dengan kewenangan pendamping, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan untuk kita coba kita tambahkan...

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Izin, Pimpinan

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Silakan, silakan Bu Sri ya.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Oke, Pak, yang saya tahu teman-teman pendamping itu juga ada yang membantu untuk itu. Artinya bukan berarti ikut seperti inspektorat, tetapi paling tidak bagaimana memberikan semacam apa ya pemikiran, bukan pemikiran, artinya paling *nggak*, ada semacam *guidance* begitu ya, yang harus dilakukan begitu, sehingga tidak terjadi ini.

Dan yang kedua, artinya inspektorat ini tidak efektif dalam melakukan hal ini, dalam melakukan pemeriksaan. Karena apa? karena terbukti, bahwa sebagian besar itu mengalami ketakutan terhadap hal tersebut. Kalau memang itu tugas inspektorat berarti ya inspektorat yang harus dimanfaatkan pekerjaannya untuk itu, karena ini penting, Pak. Jangan sampai kepala desa ini ingin menjadi kepala desa bukan untuk membangun desa, tetapi untuk memanfaatkan kesempatan. Karena sekarang yang ingin menjadi kepala desa ini *ndak* main-main juga dan biayanya cukup tinggi untuk menjadi kepaladesa itu. Seperti Pilpres Pileg kemarin, tinggi juga yang mengagetkan banyak orang itu.

*Nah*, kemudian yang selanjutnya, Pak, saya mohon izin, kalau memang tadi Pak Menteri menyampaikan untuk apa untuk diatur yang BUMDes itu dulu kan 50 juta ya, Pak ya, per BUMDes-nya, *nah*, sekarang ini saya hitung kan 93 juta sekian. *Nah*, kalau mungkin dibuat 50 atau 75 mungkin ya kemarin ada yang atau 50 juta ada yang 50. *Nah*, itu akan mungkin akan lebih mendapatkan kuantitas yang lebih daripada yang sekarang, ini usulan.

Terima kasih, Pak.



**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Silakan Pak Menteri.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Ya, Pak Dewo, silakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Mohon maaf Pak Menteri, saya... saya menanggapi yang Pak Menteri soal masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa ini menjadi aspirasi para kepala desa, Pak, karena memang dinamika pembangunan di desa butuh situasi ketenangan, kesejukan dan kedamaian. Kalau-kalau pemilihan kepala desa dalam tempo singkat dilakukan lagi pemilihan, itu situasi politik di desa tidak kondusif, ini mengganggu dinamika pembangunan di...di desa, pemerintahan desa pun tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi menjalankan kewajiban dan kewenangannya untuk membangun dan melayani masyarakat desa.

Saya harap Menteri Desa pada posisi yang-yang jelas, yang *firm* bahwa Menteri Desa juga sepakat untuk revisi Undang-Undang Desa ini, isu utama adalah masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun, ini senapas dengan pemerintahan desa di bawah Kementerian Desa. Ini senapas kalau Menteri Desa posisinya tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh para kepala desa ya tidak memahami dan juga tidak mau tahu bagaimana dinamika di desa ini artinya tidak senapas, tidak sejalan, maka saya memberikan saran kepada Menteri Desa jangan hanya tingkatannya koordinasi, apalagi hanya sekedar bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Desa harus memberikan dorongan kepada Menteri Dalam Negeri supaya Menteri Dalam Negeri segera merespon keinginannya DPR yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena DPR ini terlepas dari segala kepentingan politik, kepentingan golongannya. DPR semata-mata karena mengakomodir aspirasi para kepala desa karena semata-mata paham dinamika, situasi politik di desa yang solusi paling tepat, paling bijak itu adalah memperpanjang masa jabatan itu menjadi 8 tahun. Maka saya dalam forum ini mendesak, mendorong kepada Menteri Desa untuk mendorong juga kepada Menteri Dalam Negeri, meskipun dari kami DPR RI juga upaya terus- menerus untuk merealisasikan revisi Undang-Undang Desa dengan isu utama



masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Saya harap Pak Menteri Desa satu frekuensi dengan kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):**

Terima kasih.

Jadi kita berkali-kali bertanya itu juga dalam rangka mendorong, Pak. Karena caranya mendorong hanya bisa dengan bertanya, tidak lebih dari itu, karena di luar kewenangan kita.

Kemudian terkait dengan ada pendamping yang ikut membantu pelaporan, itu tugas tambahan secara kearifan lokal, tidak pada posisi Tusi. Jadi, jadi kalau memang ada begitu itu adalah karena hubungan baik atau karena ada kelebihan kemampuan yang kemudian dimanfaatkan oleh kepala desa untuk ikut membantu pembuatan laporan, tapi bukan merupakan Tusi.

Kalau kemudian sudah masuk pada level inspektorat posisi Kementerian Desa sama, mendorong, tapi menanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri, karena inspektorat bukan menjadi wilayahnya Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian yang terakhir yang terkait dengan perubahan angka dan seterusnya *monggo* silakan dibahas lebih lanjut dengan Biro Oren, karena posisinya pada ada pada di Biro Oren.

Kemudian saya lanjutkan yang setelah Bu, oh sudah-sudah Pak Ilham sudah saya jawab tadi.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/FPG):**

Terima kasih, Pak Menteri.

Sekarang kalau sudah tiada apa pendalaman dari teman-teman atas jawaban dari Pak Menteri, maka kita masuk pada kesimpulan. Kebetulan hari ini sudah 11.30 dan bulan puasa juga, terima kasih waktunya semuanya diatur dengan baik, tolong draf kesimpulannya.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Rabu, 13 Maret 2024.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam APBN tahun anggaran 2023:

a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi realisasi keuangan adalah 98,13%, sementara fisik realisasinya adalah juga sama 98,13%.

b. Terhadap program atau kegiatan di tahun anggaran 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan tahun anggaran 2023, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, agar pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Selanjutnya terkait dengan kebijakan *automatic adjustment* tahun anggaran 2024 Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian *output* program prioritas tahun anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun anggaran 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, untuk mendorong peningkatan kinerja BUMDes dan desa wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomimasyarakat desa.

Bagaimana yang terhormat Anggota Komisi V?  
Setuju?  
Bagaimana, Pak Menteri?

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Pak, sebentar Pak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Masih ada?  
Silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Tadi kan ada masukan dari Pak Menteri tadi untuk mengatur itu harus masuk di situ *dong*.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Yang mana, yang mana?

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Yang BUMDes tadi, BUMDes, Pak, iya.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya, jadi pengalokasian langsung di Biro Perencanaan saja, Bu Sri, tadi, nggak usah dimasukkan di sini maksudnya, perlu dimasukkan sini juga? Kan sudah di...di...disampaikan langsung sama Pak Menteri, berhubungan langsung dengan Biro Perencanaan saja.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Kalau di situ ada kalimat yang memang mewedahi itu, *nggak* masalah, tapi kalau hanya seperti ini.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Jadi yang kedua itu, Bu Sri, sebenarnya sudah bisa masuk di situ, karena kalau saya ingin membaca ulang komisi apa angka kedua ini:

" Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, agar pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan *automatic adjustment* tahun anggaran 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi, untuk memastikan agar tidak mempengaruhi capaian *output* program prioritas sesuai-sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI".

Itu maksudnya, masuk di situ berangkat, Bu, masuk di sesuai saran tadi.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Yang penting masuk aja gitu, jangan sampai karena *nggak* masuk kemudian *nggak* ada gitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Pak Menteri setuju?  
Pemerintah setuju ini?  
Setuju ya, baik.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang penting masuk.

Baiklah.

Dengan disetujuinya kesimpulan tadi maka sekarang sambutan akhir dari atau kata penutup dari Pak Menteri. Pak Menteri, kata penutup.

Kami persilakan.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):**

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sinergitas, dukungan dan kerja sama yang sangat bagus selama ini dan termasuk hari ini sehingga rapat kerja kita bisa selesaikan dengan waktu yang sangat pendek.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Terima kasih.

Kami juga nama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI tentu selama berlangsungnya acara rapat hari ini kalau ada titik-titik lemah pembicaraan kami kami juga mohon maaf di bulan puasa ramadhan ini.

Terima kasih kita tutup rapat ini dengan ucapan,

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.35 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 13 Maret 2024  
a.n. **KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
NIP. 196912021998032002